



**LKIP**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**KBUPATEN BELU**

**2025**

BNN Kabupaten Belu

JL. El. Tari No. 2 - Atambua

Email : [hnnkbelu@gmail.com](mailto:hnnkbelu@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu dapat melaksanakan Program Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Belu.

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BNNK Belu terhadap pencapaian sasaran kinerja yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kepala BNNK Belu Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu selama Tahun 2025.

Laporan ini juga merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur, wujud transparansi kepada masyarakat dan merupakan alat kendali maupun alat pemacu untuk peningkatan kinerja satuan kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja yang berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran jelas, obyektif, dan akuntabel kepada publik tentang kinerja BNNK Belu, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan kinerja BNNK Belu Tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan kinerja Satuan Kerja BNNK Belu dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government pada masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, kami mengajak kepada semua pihak di lingkungan BNN Kabupaten Belu untuk senantiasa bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab, demi suksesnya pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Belu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan tugas yang di emban. Amin.

Selaku Pimpinan BNNK Belu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran atas keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas, yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras bersama, namun demikian hasil yang telah dicapai tahun 2025 tentunya masih perlu perbaikan dan peningkatan serta penyempurnaan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Akhir kata, Laporan Kinerja BNNK Belu Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan dari perumusan arah kebijakan dan strategi BNN berikutnya.

**Atambua, 12 Januari 2026**  
**Kepala Badan Narkotika Nasional**  
**Kabupaten Belu,**



**Mateus Cono, SH, M.H**  
**AKBP NRP. 6803051**

## IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 pasal 64 tentang Narkotika, telah mengamanatkan tentang pembentukan kelembagaan Badan Narkotika Nasional, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, menetapkan 3 (tiga) Bidang sebagai pilar utama yakni Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah.

Dalam menyusun Visi dan Misi Tahun 2025-2029, BNN Kabupaten Belu berpedoman atau mengacu pada visi dan misi BNN Tahun 2025-2029 dengan melihat kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu sebagai *focal point* memiliki visi sebagai berikut :

<b>VISI</b>	Bersih Narkoba untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kota Kupang Unggul Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
-------------	--

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu juga memiliki misi sebagai berikut :

<b>MISI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</li><li>2. Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba.</li><li>3. Mendorong tata kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan transformasi digital.</li></ol>
-------------	---

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu menetapkan tujuan dalam periode 2025-2029 sebagai berikut :

<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.</b></li> <li><b>2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.</b></li> </ol>
---------------	---

Sedangkan Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu periode 2025-2029 dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.</b></li> <li><b>2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.</b></li> </ol>
--------------------------	---

Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian IKK Satker BNN Kabupaten Belu Tahun 2025, dapat dirincikan sebagai berikut :

1. **IKK Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 53,51 indeks dan realisasi 54,49 indeks atau 105,56 %.** Untuk mendukung IKK tersebut dilakukan kegiatan pengukuran ketahanan diri remaja yang meliputi dimensi *self regulation, assertiveness dan reaching out*. Indeks ketahanan diri remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ketahanan diri remaja yang meliputi dimensi *self regulation, assertiveness dan reaching out*. Sasaran pengukuran yaitu para remaja yang mengikuti kegiatan P4GN selama tahun 2025 sebanyak 415 orang yang tersebar di 14 sekolah.
2. **IKK Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi dengan target 1,40 indeks dapat tercapai 1,88 indeks atau 134,28 %** yang dilakukan di Desa bersinar berupa fasilitasi Advokasi desa bersinar, pembentukan relawan anti narkoba, Intervensi Ketahanan Keluarga, Pendidik Remaja Teman Sebaya dan diseminasi informasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Desa Bersinar, Pemerintah Kabupaten Belu menyediakan anggaran sebesar Rp. 175.519.952 melalui APB-Desa 2025 yang tersebar di 23 Desa (33,33%) dari total 69 Desa di Kabupaten Belu.  
Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yakni Rp.107.833.400 pada 11 Desa atau 15,94%. Kegiatan P4GN yang berkelanjutan di Desa diharapkan berdampak pada meningkatnya ketahanan keluarga yang ada di desa.

3. **IKK Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba** dengan target **76,700 indeks dapat tercapai 92,879 indeks atau 121,09%** yang dilakukan berupa budidaya ayam broiler sebanyak 1.000 ekor dengan sasaran 20 peserta (Kelompok Silawan Bersinar) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur. Desa Silawan merupakan Desa Perbatasan RI-RDTL dengan tingkat **kerawanan Bahaya**. Penilaian terhadap keterpulihan kawasan rawan dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan respondennya Masyarakat (20 orang), Kepala Desa (1 orang) dan Aparat Penegak Hukum (1 orang) di Desa Silawan
4. **IKK Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup dengan target 75,50 % terealisasi 100% atau 100 %**. Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Persentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah dilihat dari Instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL).
5. **IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih dengan target 5 orang tercapai 5 orang atau 100%**. Metode yang digunakan untuk mencapai indikator ini adalah dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM.
6. **IKK Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional dengan target 1 lembaga dapat tercapai 1 lembaga atau 100%**. Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Jumlah Lembaga rehabilitasi adalah melalui kegiatan peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitasi) lembaga rehabilitasi yang telah operasional BNN Kabupaten Belu.
7. **IKK Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional dengan target 1 unit IBM dapat tercapai 1 unit IBM atau 100 %**. Metode yang digunakan untuk mengukur capain jumlah unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah melalui kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat yang telah dilaksanakan BNN Kabupaten Belu.
8. **IKK Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN dengan target 3,8% tetapi tidak tercapai atau 0 %**. Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Belu adalah dilihat dari kuesioner Indeks Kepuasan layanan Rehabilitasi BNN Kabupaten Belu.

Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi tidak ada nilainya, dikarenakan Kriteria Responden Penerima Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan anak yang berusia minimal 12 tahun dan kurang dari 18 Tahun sehingga Klien anak yang di layanani Klinik Pratama BNNK Belu berusia 3 tahun - 9 Tahun tidak mengisi Survei IKM karena tidak memenuhi Kriteria Inklusi.

9. **IKK Nilai Kinerja Anggaran Satker Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 dengan target 100 (sangat baik) indeks dapat tercapai 97,76 indeks atau 97,76%.** Metode yang digunakan untuk mencapai indikator ini adalah pengukuran yang dilakukan melalui Aplikasi Smartkemenkeu pada **Indikator Nilai Kinerja Perencanaan sebesar 96,03 dan Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,49 indeks** sehingga total nilai 97,76 %.

10. **IKK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu dengan target 100 indeks dapat tercapai 99.49 indeks atau 99,49 %.** Metode pengukuran yang digunakan adalah data realisasi Nilai IKPA pada aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja antara lain indikator : 1) Revisi DIPA (100), 2). Deviasi Halaman III DIPA (100), 3). Penyerapan Anggaran (100%), 4) Belanja Kontraktual (100),) (5) Penyelesaian Tagihan (100%), (6). Pengelolaan UP dan TUP (98,88); dan (7). Capaian Output (98,42).

Berdasarkan 10 (sepuluh) capaian IKK Satker BNN Kabupaten Belu Tahun 2025, maka dapat dijelaskan bahwa IKK yang melampaui target sebanyak 7 (tujuh) IKK sedangkan IKK yang tidak mencapai atau dibawah target sebanyak 3 (tiga) IKK, maka dapat direkomendasi langkah-langkah peningkatan kinerja di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyearluaskan informasi P4GN melalui media sesuai perkembangan zaman secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
2. Membuat terobosan dan inovasi dalam melakukan diseminasi informasi tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas intervensi P4GN terhadap keluarga dan desa serta memperkuat sinergitas yang telah terbangun bersama Pemda dan lintas sektor lainnya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan.
5. Meningkatkan sinergitas dan mendorong instansi/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan P4GN di lingkungannya.
6. Memberikan keterampilan kepada penyalahguna atau pecandu agar kualitas hidup lebih baik.

7. Adanya pelatihan secara berkala kepada Petugas IBM / Agen Pemulihan tentang Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
8. Pemetaan kembali lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen masyarakat yang akan diberi peningkatan kemampuan agar operasional.
9. Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba.
10. Koordinasi dengan pembina teknis untuk meningkatkan fasilitas Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat yang operasional. Sosialisasi program Rehabilitasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba di wilayah Kabupaten Belu.
11. Membuat komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD),

Berikut ikhtisar capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 :

Tujuan: Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba					
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indek Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,51 Indeks	54,49 Indeks	105,56%
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indek Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	76,700 Indeks	92,879 Indeks	121,09%
3.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan.	Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	1,40 Indeks	1,88 Indeks	134,28%
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75,50%	100 %	100%
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	5 Orang	100%
6.	Meningkatnya	Jumlah lembaga	1	1	100%

	aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	rehabilitasi yang operasional	Lembaga	Lembaga	
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1 Unit	1 Unit	100%
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,8 Indeks	-	-
<b>Tujuan: Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas</b>					
1	Meningkatnya prosess manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	97,76%
<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks	99,49 Indeks	99,49%

Dalam pencapaian kinerja tersebut, BNNK Belu didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 1.764.011.000,-** (*Satu miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Sebelas ribu rupiah*) setelah dilakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp.222.251.000** dan sisa Pagu menjadi **Rp. 1.541.764.000** dan terealisasi **sebesar Rp.1.359.996.505,-** (*Satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam Ribu lima ratus lima rupiah*) atau **88,21%**. (per 31 Desember 2025). Sisa anggaran yang tidak dapat terealisasikan sebesar **Rp.18.326.495,-** (*Delapan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) atau **11.79 %**.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
IKHTISAR CAPAI KINERJA BNNK BELU TAHUN 2025 .....	4
DAFTAR ISI .....	10
BAB I PENDAHULUAN .....	14
A. LATAR BELAKANG .....	12
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	13
C. DASAR HUKUM .....	13
D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN .....	14
E. STRUKTUR ORGANISASI .....	16
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA BNNK BELU .....	19
A. RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA) 2025-2029 .....	19
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	25
C. PERJANJIAN KINERJA .....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
A. CAPAIAN KINERJA .....	30
SASARAN KEGIATAN 1 “Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalajgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika” .....	32
SASARAN KEGIATAN 2 “Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalajgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika” .....	40
SASARAN KEGIATAN 3 “Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN” .....	47
SASARAN KEGIATAN 4 “Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah rawan Narkoba secara berkelanjutan.....	51
SASARAN KEGIATAN 5 “Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi” .....	54
SASARAN KEGIATAN 6 “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika” .....	58

SASARAN KEGIATAN 7 “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika” .....	62
SASARAN KEGIATAN 8 “Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika” .....	66
SASARAN KEGIATAN 9 “Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien” .....	68
BAB IV PENUTUP .....	81
A. KESIMPULAN .....	81
B. SARAN .....	83

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mengusung visi “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**” yang diwujudkan melalui 8 (Delapan) misi Pembangunan Nasional (Asta Cita). Salah satu misi tersebut menegaskan pentingnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk di dalamnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Dengan demikian, permasalahan narkoba menjadi salah satu fokus pembangunan nasional yang ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Permasalahan Narkoba sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi guna mengatur pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, tentang rehabilitasi medis dan sosial. Selain pemanfaatan narkoba, juga upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Meskipun demikian, pada kenyataannya tindak pidana Narkoba di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Korban yang semakin meluas, pada umumnya berada di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda. Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, namun melibatkan banyak orang secara bersama-sama. Sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas, bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang menjadi leading sektor penanganan permasalahan narkoba. Tugas dan fungsi BNN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN). Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Narkoba Nasional (BNN) menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban BNN kepada masyarakat dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BNN.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKIP BNNK Belu Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan P4GN dalam rangka mencapai visi dan misi BNNK Belu.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan Program P4GN BNNK Belu Tahun 2025. Tersedianya bahan evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa Rekomendasi. Diharapkan Rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi BNNK Belu untuk Tahun 2026, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

Kedudukan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berkedudukan di daerah Kabupaten Belu dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Republik Indonesia. BNNK Belu dipimpin oleh seorang Kepala.

### **1. Tugas**

BNNK Belu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia di Wilayah Kabupaten/Kota Belu dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik Lembaga Pemerintah, Swasta, Masyarakat guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
- j. Selain tugas tersebut, BNNK Belu juga bertugas melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan

adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNNK Belu berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah.

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, BNNK Belu menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNK Belu.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- f. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- h. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- i. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat daerah.
- j. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

- k. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psicotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- l. Pelaksanaan kerja sama daerah di bidang P4GN.
- m. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNNK Belu.
- n. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- o. Pelaksanaan pendataan dan informasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

### **3. Kewenangan**

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Belu dan Kabupaten Belu berdasarkan zonasi wilayah berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.

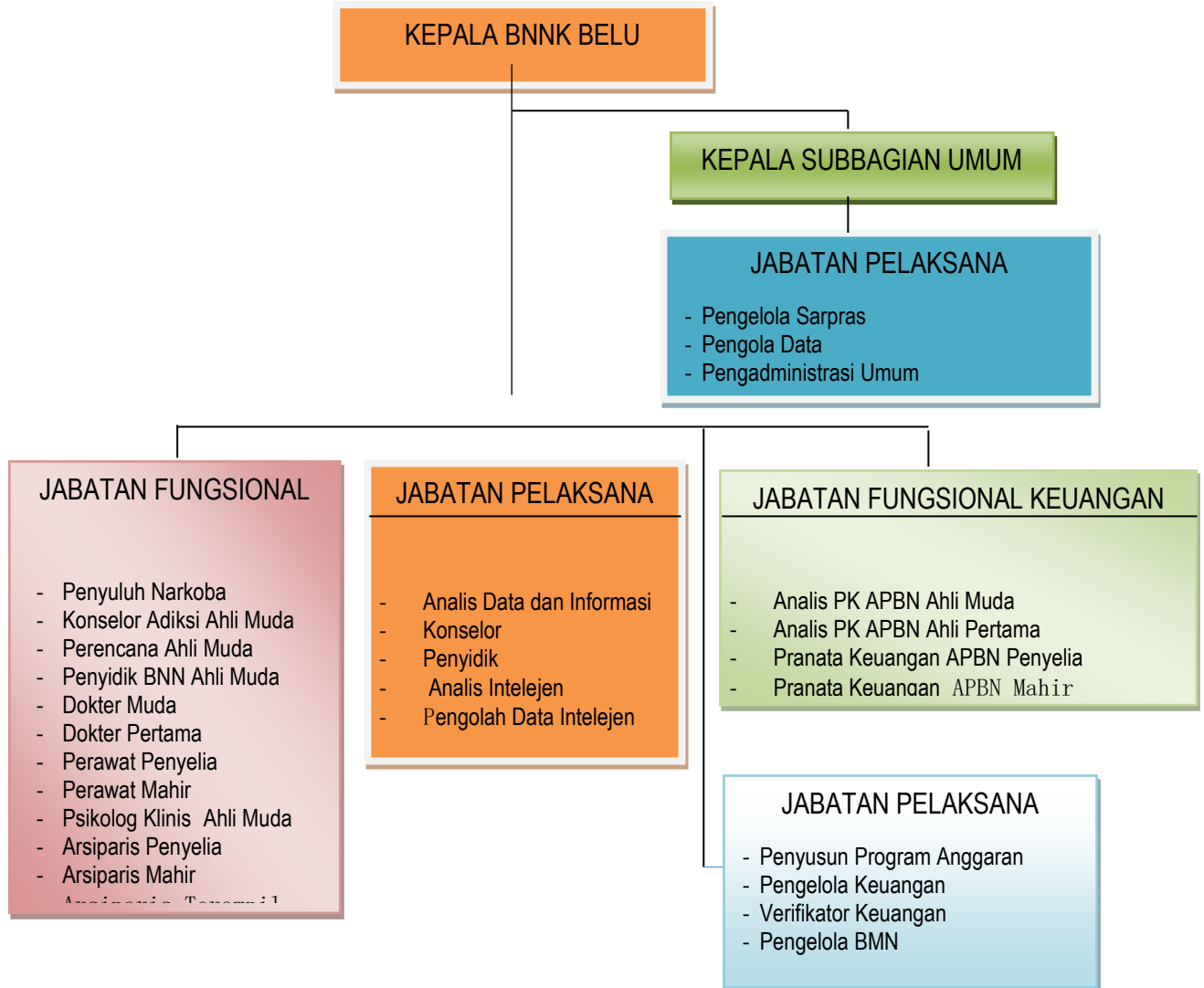
## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk mengaktualisasi tugas dan fungsi, BNN memiliki struktur organisasi sebagai berikut (sesuai Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/175/II/KA/ KP.07.00/2022/BNN tentang Peta Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional tanggal 15 Februari 2022):

1. Kepala BNN.
2. Kepala Sub Bagian Umum.
3. Jabatan Fungsional
4. Jabatan Pelaksana
5. Jabatan Fungsional Keuangan

Gambar 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN BELU**



## SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu disusun sebagai berikut :

### **BAB I      Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika Penyajian

### **BAB II     Perencanaan Kinerja**

- A. Rencana Program Kerja (Renproja) 2022 - 2024
- B. Rencana Kerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

### **BAB III    Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja
- B. Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV    Penutup**

### **LAMPIRAN**

- 1. Perjanjian Kinerja.
- 2. Lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA PROGRAM KERJA (RENPROJA) 2025 - 2029

Perencanaan adalah salah satu proses manajemen untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan.

Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Strategi (Renstra) BNN Tahun 2025 - 2029 dan Penetapan Kinerja BNN Tahun 2025.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/BNNTAHUN 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Belu.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNNK Belu telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
2. Program Dukungan Manajemen (*Program Generik*).

Penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025-2029.



**Gambar 2**  
**TAHAPAN PENYUSUNAN RENPROJA BNN 2025 - 2029**



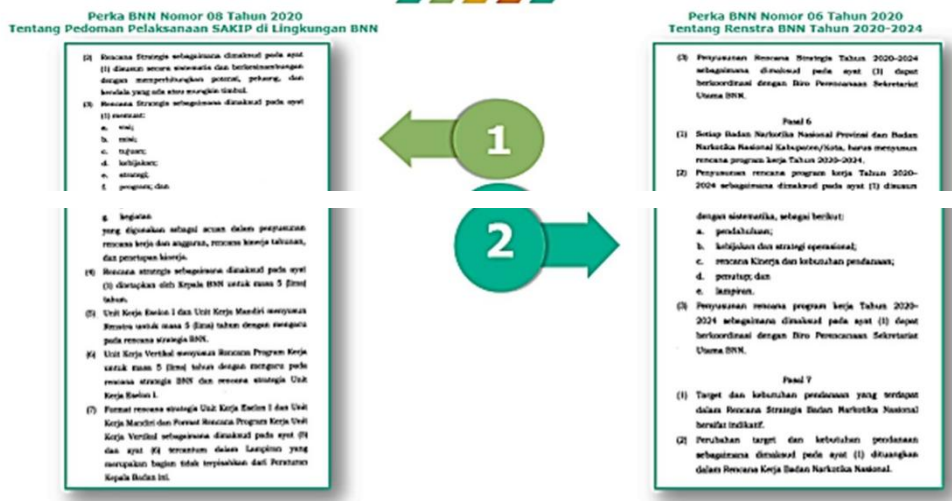
**Sumber : Materi Bimtek Perencanaan Biro Perencanaan BNN RI Tahun 2021**

Berkenaan dengan Mandat tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu menyusun Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari Renstra BNN Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu juga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNNK Belu dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan di tahun berikutnya.

Gambar 3

**MANDAT PENYUSUNAN RENPROJA BNN 2025 - 2029**

**MANDAT PENYUSUNAN RENPROJA**



**Sumber : Materi Bimtek Perencanaan Biro Perencanaan BNN RI Tahun 2021**

Renproja Jangka Menengah BNNK Belu akan dimulai dengan menjelaskan tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan BNNK Belu dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih BNNK Belu, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BNNK Belu terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada BNNK Belu akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renproja Jangka Menengah BNNK Belu ini.

Informasi dan harapan serta keinginan masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh BNNK Belu dalam tiga tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNNK Belu di masa yang akan datang.

Visi dan Misi yang tertuang didalam Rencana Strategis 2025-2029 menjadi panduan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Narkotika Nasional, sebagai implementasi Rencana Strategis tersebut, program dan kegiatan di BNN perlu dirumuskan dalam Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2025-2029 setiap Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang merupakan bagian dari sistem perencanaan strategis organisasi.

Penyusunan dokumen ini (RENPROJA) Tahun 2025-2029 BNNK Belu tetap mengacu kepada Mandat Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu.

**Tabel 1**  
**Matrik Rencana Kinerja**  
**Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu**  
**Tahun 2025-2029**

N O	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	10 Orang	0 org	10 Orang	10 Orang	10 Org
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di	5 Orang	5 Org	6 Orang	7 Orang	8 Org

N O	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
		narkotika	wilayah provinsi					
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	1 Lm bga	1 Lem baga	1 Lem bga	1 Lem baga	1 Lem baga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	0	0	0	0	0
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Org	5 Org	5 Org	5 Org	5 Org
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	0 Org	0 Org	0 Org	0 Org	0 Org
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	1 Lemb aga	1 Lem baga	2 Lemb aga	3 Lemb aga	4 Lem baga
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN	3,84	3,85	3,86	3,90	3,92
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis	Meningkatnya pemetaan jaringan	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan	0	0	0	0	0

N O	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
	teknologi	peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)					
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	0	0	0	0	0
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	0	0	0	0	0
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	0	0	0	0	0
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	0	0	0	0	0
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	0	0	0	0	0
1.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	100	100	100	100	100
1	Pembinaan	Meningkatnya						

N O	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
2.	Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	100	100	100	100

*\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Berdasarkan table di atas, BNNK Belu mendukung pencapaian sasaran strategis BNN yaitu “Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk, meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat, meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba dan meningkatnya pengungkapan jaringan dan asset sindikat peredaran gelap narkoba melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis) dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNNK Belu melalui Program Dukungan Manajemen (Program Generik).

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

BNNK Belu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Strategis BNN 2025–2029. Rencana Kerja BNNK Belu Tahun 2025 ini merupakan gambaran rencana program kerja dalam satu tahun yang memuat rencana program, rencana kegiatan, Proyek Prioritas Nasional yang mendukung Rencana Kerja Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 memiliki 8 prioritas nasional dimana salah satu prioritas nasionalnya adalah **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. BNN melalui program kerjanya mendukung pencapaian prioritas nasional ini.

Isu penanganan permasalahan narkoba pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diafirmasi melalui Proyek Prioritas Nasional **“Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba”** dan **“Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba”**.

Kedua Proyek Prioritas Nasional tersebut menjadi komponen dari Kegiatan Prioritas Nasional **“Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”** yang terkonsolidasi dalam Program Prioritas Nasional “Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”. Program Prioritas Nasional **“Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”** sendiri merupakan bagian

dari strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian salah satu sasaran Prioritas Nasional (PN) **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**.

Proyek Prioritas Nasional “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” pada RKP Tahun 2025 diimplementasikan melalui 20 (dua puluh) rincian output yang terbagi dalam 2 program yaitu Prioritas Nasional (PN) dan Non PN. Program Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Tahunan BNNK Belu Tahun 2025 yaitu :

- 1) Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
- 2) Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa
- 3) Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
- 4) Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba Yang Terbentuk.

Sedangkan Program Non Prioritas Nasional “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” pada RKP Tahun 2025 diimplementasikan melalui 13 (tiga belas) rincian output dalam Rencana Kerja Tahunan BNNK Belu Tahun 2025 yaitu :

- 1) Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi;
- 2) Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)
- 3) Petugas Pelaksanaan Inventaris Berbasis Masyarakat Yang Diberikan Pelatihan
- 4). Layanan Rehabilitasi di BNNK
- 5). Layanan IBM
- 6). Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)
- 7). Layanan Perkantoran
- 8). Layanan Manajemen Keuangan
- 9). Layanan Manajemen SDM
- 9). Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- 10). Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- 11). Layanan Umum
- 12). Layanan Perkantoran
- 13). Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu yang telah disusun serta memuat target tahunan dan sebagai media penghubung antara Rencana Program Kerja dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Pada Tahun 2025 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu telah menuangkan serta memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu Tahun 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,51 Indeks	57.000.000
2.	Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk lahgun dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	76,700 Indeks	75.000.000
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	1, 40 Indeks	80.000.000
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75,50%	11.720.000
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	14.037.000
6.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,8 Indeks	56.640.000
7.	Meningkatnya	Jumlah lembaga	1 Lembaga	2.400.000

	aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	rehabilitasi yang operasional		
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	1 Unit	13.170.000
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	SANGAT BAIK	38.990.000
11.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks	1.218.545.000

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan BNNK Belu adalah PK (Perjanjian Kinerja) yang ditetapkan 30 Januari 2025 antara pihak BNNP NTT dengan BNNK Belu di Jakarta.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu dalam Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu**  
**Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA ANGGARAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,51 Indeks
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	76,700 Indeks
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	1,40 Indeks
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75,50 %
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	1 Unit
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,8 Indeks
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	SANGAT BAIK
10.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

#### A.1. Ringkasan Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025, BNNK Belu sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja di lingkungan BNNK Belu, hal tersebut adalah sebagai bentuk komitmen dari pimpinan organisasi untuk mewujudkan setiap sasaran kegiatan yang diperjanjikan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sepuluh sasaran kegiatan tersebut, meliputi 8 (delapan) sasaran kegiatan bidang operasional yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum sedangkan 2 sasaran kegiatan lainnya menjadi penyanggah untuk mendukung pencapaian sasaran kepentingan umum.

Berikut gambaran capaian, setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja**  
**Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu Tahun 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika	53,51 Indeks	56,49 Indeks	105,57 %
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkotika	76,700 Indeks	92,88 Indeks	121,09 %
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	1,400 Indeks	1,88 Indeks	134,28 %
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu	75,50%	100%	132,5 %

		narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup			
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	5 Orang	100 %
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	150 %
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	1 Unit	1 Unit	100 %
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,8 Indeks	- Indeks	- %
9.	Meningkatnya prosess manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	97,76 %
10.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks	99,49 Indeks	99,49%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNK Belu selama kurun waktu tahun 2025, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun table. Capaian kinerja tahun 2025 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNNK Belu.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNNK Belu Tahun 2025, BNNK Belu melakukan survei melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program P4GN dengan pertimbangan karakteristik wilayah yang memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN terutama karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana program kerja (Renproja);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## A.2. Analisis Capaian Kinerja

<p><b>SASARAN KEGIATAN 1</b>  <b>“Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika</b></p>
<p><b>Indikator Kinerja :</b>  <b>“Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”</b></p>

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Untuk mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, harus diketahui terlebih dahulu dengan pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba atau disingkat DEKTARI di masing-masing BNN Kabupaten/Kota.

Pengukuran DEKTARI menggunakan metode survei ketahanan diri kepada kalangan remaja (tingkat pelajar atau mahasiswa) secara sampling yang sejalan dengan kegiatan penyuluhan/sosialisasi oleh penyuluh narkoba di BNN Kabupaten Belu. Pengukuran tersebut mengacu pada Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI dan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari.

Indeks Ketahanan Diri Remaja diukur dengan menggunakan skala indeks ketahanan diri adapun hasil pengukuran yang digunakan meliputi Dimensi **Self Regulation, Assertiveness, dan Reaching Out** dan konteks pelaksanaan Standar Aktivitas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam kegiatan pengelolaan Informasi yang dibandingkan dengan Data Sekunder Kasus Narkoba Remaja, Kegiatan Positif Remaja serta jumlah Remaja yang mengikuti kegiatan positif.

**Self regulation** merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respons perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang.

**Assertiveness** adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain.

**Reaching out** didefinisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain”.

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survey untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) di Kabupaten Belu. Aspek Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dikaji melalui kegiatan yang merupakan prioritas nasional di tahun 2024, program kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

#### **a. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan dalam bentuk tatap muka (luring), melalui penyampaian materi, dan diisi dengan diskusi, sharing pengalaman, tanya jawab, praktik, dan presentasi.

#### **b. Media Kegiatan**

Media yang digunakan dalam Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja adalah media visual (ilustrasi, potongan gambar, grafik, poster, dll) dan audio visual (video, film, dll) dan media cetak (textual).

**c. Fasilitas**

Fasilitas yang disediakan kepada peserta adalah, hand out (materi) kegiatan, bahan tayang, fasilitator yang berpengalaman dibidangnya, konsultasi dengan fasilitator, ruang yang representative guna pelaksanaan tatap muka, konsumsi pada saat tatap muka.

**d. Kepesertaan**

Peserta dalam kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja beranggotakan 10 (sepuluh) orang, dimana sepuluh peserta ini adalah peserta yang sama dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

**e. Fasilitator**

Fasilitator/narasumber yang terlibat dalam pemberian materi Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja berasal dari instansi lain sesuai dengan kompetensi / keahlian yang dimiliki.

**f. Moderator**

Diskusi (dialog) dilaksanakan setelah fasilitator selesai melaksanakan presentasi, dan diskusi dipimpin oleh moderator.

**g. Pengujian Peserta Kegiatan.**

Pada sesi akhir Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja (pertemuan kesepuluh) dilaksanakan pengujian ketahanan diri peserta menggunakan aplikasi Dektari Aja. Pengujian akhir ini terkait dengan hasil pelaksanaan guna memperoleh angka ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna narkoba.

**h. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian**

1. Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ )
2. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
3. Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
4. Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ )

Adapun metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui :

- Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari Aja diakhir pertemuan, dan kompetensi yang diukur ditahun selanjutnya melalui Temu Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika.
- Tabulasi pengukuran kompetensi akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan edukasi dalam salah satu agenda Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi.

**Tabel 5.**  
**Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$\frac{\sum(b/a)}{100} \times 100$	$= \frac{5}{3} \times 100$ $= 166 \%$	<p><math>\Sigma</math> = Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi</p> <p><b>A</b> = Jumlah target kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"</p> <p><b>B</b> = Jumlah realisasi kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"</p>

Informasi target dan realisasi sasaran kegiatan capaian kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 6.**  
**DATA CAPAIAN DEKTARI BNNK BELU TA 2025**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI)	<b>53,51 Indeks</b>	<b>56,49 Indeks</b>	<b>105,57%</b>

Berdasarkan surat Deputi Pencegahan Nomor: B/21/I/DE/PC/2025/BNN tanggal 02 Januari 2025 perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2025 disebutkan bahwa Nilai Capaian angka Indeks DEKTARI Tahun 2025 pada BNNK Belu adalah **56,49** atau **105,57 %** dari target **53,55 indeks** yang telah ditetapkan dan termasuk dalam Kategori **Sangat Tinggi**.

Penentuan target kinerja Tahun 2025 sebesar 53,51 Indeks mengalami peningkatan angka target dari Tahun 2024. Indeks sebagaimana rencana target kinerja Renstra BNN 2025-2029 karena adanya beberapa faktor yang dapat dicapai dari target yang ditetapkan. Walaupun sumber daya anggaran dan sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai indikator tersebut maka dilakukan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi melalui diseminasi informasi dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika dengan target output sebanyak 10 remaja.

**Tabel 07**  
**Target dan Realisasi Output**  
**Pengelolaan Informasi dan Edukasi**

Indikator Klasifikasi RO	Target	Realisasi	%
Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 Remaja	10 Remaja	100

Kegiatan remaja teman sebaya ditujukan kepada remaja dengan rentang usia 13-17 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan pendidik teman sebaya anti narkoba selama 3 kali pertemuan bersama 10 remaja. Adapun tema yang dibahas setiap kali pertemuan meliputi Potretku Kini dan Nanti, Terima Kasih Aku, Aku dan SekitarKu, Menjadi Remaja, Berani Bilang Tidak dan Aku Siap Beraksi. Sebelumnya dilakukan juga rapat koordinasi bersama lintas sector dan pembekalan kepada guru pendamping dari 3 sekolah sasaran kegiatan yaitu SMPN 1 Tasifeto Barat, SMPN Ainiba dan SMPK Santo Petrus Dualilu Atapupu. Sebagai bentuk tindak lanjut di sekolah, peserta pelatihan melakukan pengimbasan kepada teman sebaya di sekolah sebanyak 300 siswa dalam bentuk penyuluhan bahaya narkoba dan diskusi kelompok terpimpin.

Selain kegiatan remaja teman sebaya, BNNK Belu melakukan kegiatan diseminasi informasi dalam rangka penyebaran informasi P4GN yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga berdampak pada peningkatan ketahanan diri remaja. Adapun kegiatan diseminasi informasi meliputi diseminasi informasi melalui insert konten, placement radio lokal/daerah, media luar ruang, media sosial dan kampanye/pagelaran seni.

Indeks ketahanan diri remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ketahanan diri remaja yang meliputi dimensi **self regulation, assertiveness dan reaching out**. Sasaran pengukuran yaitu para remaja yang mengikuti kegiatan P4GN selama tahun 2025 sebanyak 415 orang yang tersebar di 14 sekolah.

**Tabel 08**  
**Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Indeks Ketahanan Diri Remaja	53,51 indeks (Sangat Tinggi)	56,49 indeks (Sangat Tinggi)	105,56

Hasil ini menunjukkan bahwa ketahanan diri para remaja di Kabupaten Belu terhadap bahaya penyalahgunaan keluarga memiliki nilai indeks **56,49** dengan kategori **sangat tinggi** dan mengalami persentase capaian sebesar **105,56%**.

**a. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor penyebab pencapaian keberhasilan dari kegiatan pengelolaan informasi edukasi adalah terjalinnya sinergitas yang baik antara BNNK Belu dengan Lingkungan Pendidikan, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat, kelompok swasta dan berbagai insan media di Kabupaten Belu sehingga memudahkan penyebarluasan informasi P4GN.

**b. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan ketahanan diri dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terhadap diri remaja dengan harapan mampu menciptakan dan meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba maka rencana aksi dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyebarluaskan informasi P4GN secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder.
- 3) Membuat terobosan dan inovasi dalam melakukan diseminasi informasi tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penetapan dan pemilihan remaja sebagai responden untuk mengisi kuesioner tersebut sangat selektif dan diberikan pembekalan secara berkelanjutan sehingga dalam pengisian kuesioner aplikasi dektari secara tepat dan cepat.
2. Adanya peningkatan partisipasi remaja dalam program serta tersampainya sebaran informasi secara efektif.
3. Adanya peningkatan kapasitas remaja melalui penyuluhan di sekolah yang menjadi lokus pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya panduan dan bimbingan teknis dalam Program Dektari oleh Pembina fungsi.
2. Penggunaan anggaran sesuai perencanaan didukung dengan SDM yang memadai.
3. Adanya peningkatan pendidikan dan latihan yang diberikan oleh Deputi Pencegahan kepada SDM secara berkelanjutan melalui daring maupun luring.

Adapun permasalahan dan kendala serta hambatan DEKTARI dapat tercapai di BNNK Belu disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Perlunya peningkatan penyediaan materi dan media sebaran informasi yang lebih inovatif agar meningkatkan keterpaparan remaja terhadap informasi P4GN.
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana perkantoran mengingat wilayah Kabupaten Belu berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan penyebaran remaja yang rentan terhadap bahaya narkoba belum sepenuhnya memperoleh informasi tentang bahaya narkoba.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Akan melakukan seleksi peserta yang mengikuti program Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dari berbagai sekolah-sekolah di Kabupaten Belu.
2. Terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan sasaran Dektari.
3. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba secara mudah.
4. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan peningkatan indeks ketahanan diri remaja.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Indeks Dektari Tahun 2025 ini dengan Standar Indek Dektari Nasional Tahun 2025 adalah telah berhasil mencapai Target Nasional yang telah ditetapkan Pusat yaitu **53,51 (TINGGI)**, sedangkan nilai indeks dektari BNNK Belu mampu mencapai nilai **56,49** atau **105,56% (SANGAT TINGGI)**.

Berkaitan dengan Program Prioritas Nasional dalam Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik maka dampak Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi adalah terciptanya Masyarakat dan Remaja Teman Sebaya yang memahami dampak buruk terhadap pemakaian dan peredaran gelap serta mampu menolak untuk mempergunakan narkoba.

## SASARAN KEGIATAN 2

**“Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika”**

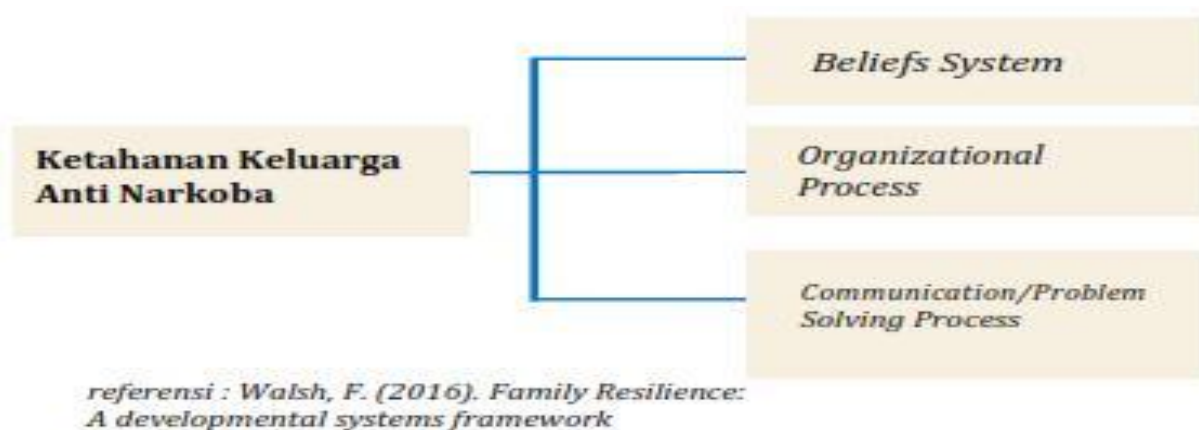
### Indikator Kinerja :

**“Indeks Ketahanan keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba”**

Definisi operasional dari sasaran kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga diperoleh berdasar hasil kuesioner Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba atau disingkat **DEKTARA**.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



Adapun metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yaitu :

### **a. Metode Pengukuran**

Setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi. Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan disetiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kota/Kabupaten yaitu 10 Kota/Kabupaten (Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2025 sesuai dengan pembagian waktu masing-masing wilayah).

**b. Pemilihan Keluarga**

Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara Simple Random Sampling dengan stratification berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua.

**c. Pemilihan Responden**

Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga, kemudian dilakukan pemilihan sampel dari 10 (sepuluh) keluarga tersebut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di Bidang Pencegahan BNN Kota/Kabupaten.

**d. Pengisian Kuisisioner**

Responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuisisioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan- kesulitan anak, pola pengasuhan orang tua, resiliensi anak dan remaja serta kepuasan mengikuti intervensi.

**e. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian**

1. Kategori Sangat Tinggi (88,31 – 100,00)
2. Kategori Tinggi (76,61 – 88,30)
3. Kategori Rendah (65,00 – 76,60)
4. Kategori Sangat Rendah (25,00 – 64,99)

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi *Mobile Dektara* terhadap desa/ gampong yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua) dimana survey ini dilaksanakan oleh Penyuluh Narkoba di Wilayah Kerja BNNP dan BNNK Kab/ Kota, maka didapatkan hasil Indeks Dektara untuk tahun 2025.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Belu di atas, dimana didapatkan nilai realisasi hasil yang diperoleh berdasarkan hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi *Mobile Dektara*, dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 9.**  
**Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Indeks Ketahanan**  
**Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	$\frac{\sum(b/a)}{100} \times 100$	= 8 / 10 x 100 = 80 %	$\Sigma$ = Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba <b>A</b> = Jumlah target kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba <b>B</b> = Jumlah realisasi kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI mengukur 3 (tiga) dimensi ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*) dan proses komunikasi (*communication/ problem solving processes*). Dalam ketiga dimensi ini terdapat 14 (empat belas) indikator dengan masing-masing deskripsi untuk menjelaskan tentang gambaran ketiga dimensi tersebut yang dituangkan dalam bentuk kuesioner bagi keluarga guna membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan keluarga.

Sasaran strategis ini bertujuan meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika. Hasil penilaian pada sasaran strategis ini menunjukkan kuatnya daya tangkal anggota keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ditunjukkan melalui kategori indeks penilaian dengan predikat sangat tinggi. Sasaran Staregis ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan capaian **92,879 Indeks** yaitu :

<b>Indikator Kinerja : Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba</b>
---

### a. Capaian Indikator Kinerja

Indeks ketahanan keluarga terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba adalah pengukuran ketahanan anti narkoba keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai indikator tersebut maka dilaksanakan pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba dan penguatan ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa dengan prioritas pelaksanaan kegiatan di Desa/Kelurahan Bersinar. Desa Bersinar merupakan salah satu program Prioritas Nasional dari BNN RI dan merupakan program unggulan yang melibatkan partisipasi aktif dan komitmen perangkat daerah bersama masyarakat desa dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Pada tahun 2025 BNNK Belu diberikan target 1 Desa Bersinar yaitu Desa Kenebibi di Kecamatan Kakuluk Mesak.

#### 1) Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba

Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkoba dilaksanakan di Desa Kenebibi. Pada kegiatan ini dilakukan intervensi kepada keluarga yang memiliki remaja sebanyak 20 keluarga (40 orang) dengan jumlah output sebanyak 20 keluarga. Sasaran intervensi mendapat workshop Kelaurag Bersinar dengan materi sebagai berikut:

- a) Narkoba dan dampaknya bagi kehidupan.
- b) Membangun kualitas yang positif pada anak dan orangtua
- c) Kualitas positif keluarga kami
- d) Belajar tentang satu sama lain dan cara menanggulangi stress
- e) Mengurangi perilaku yang tidak diinginkan orangtua/anak
- f) Memahami tekanan teman sebaya
- g) Mengenal nilai-nilai keluarga dan komunikasi

**Tabel 10**  
**Target dan Realisasi Output**  
**Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba**

Indikator Klasifikasi RO	Target	Realisasi	%
Jumlah Keluarga Penerima Program Ketahanan Keluarga	20 Keluarga	20 Keluarga	100

2) Penguatan ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa.

Program penguatan ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa dilaksanakan di desa yang telah dicanangkan sebagai desa bersih narkoba (bersinar). BNN Kabupaten Belu diberikan target untuk melaksanakan program penguatan ini pada 1 desa dan telah dilaksanakan di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak.

Melalui kegiatan ini diharapkan desa dapat melakukan kegiatan P4GN secara mandiri dan berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh desa.

Sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan Program penguatan ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belu telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Belu Tentang Penunjukan Desa Bersih Dari Narkoba (Bersinar) demi optimalnya pelaksanaan program kegiatan.

**Tabel 11**

**Target dan Realisasi Output**

**Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba  
Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa**

<b>Indikator Klasifikasi RO</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Jumlah Desa yang diadvokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	1 Desa	1 Desa	100

Kegiatan P4GN yang dilakukan di Desa bersinar berupa Fasilitasi Advokasi desa bersinar, pembentukan relawan anti narkoba, Intervensi Ketahanan Keluarga, Pendidik Remaja Teman Sebaya dan diseminasi informasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Desa Bersinar, Pemerintah Kabupaten Belu menyediakan anggaran sebesar Rp. 175.519.952 melalui APB-Desa 2025 yang tersebar di 23 Desa (33,33%) dari total 69 Desa di Kabupaten Belu. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yakni Rp.107.833.400 pada 11 Desa atau 15,94%. Kegiatan P4GN yang berkelanjutan di Desa diharapkan berdampak pada meningkatnya ketahanan keluarga yang ada di desa.

Penilaian terhadap indeks ketahanan keluarga dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan respondennya adalah keluarga yang telah diintervensi dengan kegiatan P4GN dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara)**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Indeks Ketahanan Diri Keluarga	76,700 (Tinggi)	92,879 Sangat Tinggi)	121,09

Hasil ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di Kabupaten Belu terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba sangat tinggi dengan nilai indeks **92,879** dengan persentase capaian sebesar **121,09%**.

Berdasarkan surat Deputi Pencegahan Nomor : B/3/I/DE/PC.01/2026/BNN tanggal 02 Januari 2026 perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Tahun 2025 disebutkan bahwa Nilai Capaian angka Indeks DEKTARA Tahun 2025 BNNK Belu sebesar **92,879** Indeks atau **121,09%** dari target **76,700** Indeks yang telah ditetapkan dan masuk **Kategori Tinggi**.

**b. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Faktor penyebab keberhasilan dari realisasi indeks ketahanan keluarga adalah partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga dan terjalinnya sinergitas antara BNNK Belu dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor lainnya dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan terhadap keluarga maupun desa sendiri sebagai lokus pelaksanaan kegiatan P4GN.

**c. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka rencana aksi dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas intervensi P4GN terhadap keluarga dan desa.
- 2) Memperkuat sinergitas yang telah terbangun bersama Pemda dan lintas sektor lainnya.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan.
- 4) Membuat Regulasi yang baku untuk penganggaran kegiatan P4GN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba dengan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba, antara lain :

1. Bimbingan teknis;
2. Workshop;
3. Pendidikan dan Pelatihan.

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama, komitmen dan partisipasi keluarga dalam mendukung pelaksanaan program P4GN.
2. Penguatan akses informasi dan edukasi P4GN belum maksimal.
3. Pemanfaatan nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam P4GN.
4. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Sasaran Kegiatan Dektara.
5. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
6. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN baik informasi edukasi maupun advokasi dilaksanakan secara berkelanjutan.
7. Tingginya tingkat partisipasi keluarga dalam kegiatan serta metode pendekatan dalam pelaksanaan program yang lebih diterima oleh masyarakat.
8. Adanya peningkatan kapasitas keluarga melalui diseminasi informasi P4GN di wilayah desa yang menjadi lokus kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran sesuai perencanaan didukung dengan SDM yang memadai sebagai fasilitator pelaksana program
2. Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada di dalam gedung/di kantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi

kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Belu.

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Dektara Tahun 2025 ini dengan Standar Indeks Dektara Nasional Tahun 2025 adalah **telah berhasil** mencapai Target Nasional yang telah ditetapkan Pusat yaitu **76,700 (SANGAT TINGGI)**, sedangkan nilai indeks Dektara BNNK Belu mencapai nilai **92,879 (SANGAT TINGGI)**.

Salah satu maksud dan tujuan serta pertimbangan pembentukan Desa Bersinar adalah dalam rangka pelaksanaan Program P4GN secara mandiri berbasis anggaran dana desa.

Dengan dilaksanakan kegiatan pembentukan Desa Bersinar dampak yang sangat dirasakan masyarakat adalah ikut aktif turut serta dalam Program P4GN, dimana salah satunya bertugas memberikan informasi tentang kejahatan peredaran gelap narkoba serta melakukan aksi sweeping terhadap toko-toko dan warung-warung penjual obat daftar G di wilayahnya masing-masing sehingga membuat masyarakat lebih terlindungi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam peredaran gelap narkoba khususnya Obat Daftar G.

Demikian pula dengan Program DEKTARA yang berdampak terbentuknya Keluarga Anti Narkoba yang tentunya memberikan contoh suri teladan kepada masyarakat sekitarnya untuk Hidup Sehat Tanpa Narkoba.

<b>SASARAN KEGIATAN 3</b>
<b>“ Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan “</b>
<b><u>Indikator Kinerja :</u></b>
<b>“ Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi “</b>

#### **a. Capaian Indikator Kinerja**

Indeks keterpulihan kawasan rawan merupakan penilaian tingkat kerawanan yang sebelumnya dikategorikan rawan, setelah mendapatkan intervensi program pemberdayaan alternative. Sasaran kegiatan adalah mantan pecandu atau masyarakat kategori tidak mampu di kawasan rawan peredaran narkoba.

Kegiatan yang dilakukan berupa budidaya ayam broiler sebanyak 1.000 ekor dengan sasaran 20 peserta (Kelompok Silawan Bersinar) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur. Desa Silawan merupakan Desa Perbatasan RI-RDTL dengan tingkat kerawanan Bahaya.

**Tabel 13**  
**Target dan Realisasi Output**  
**Pemberdayaan Alternatif**

Indikator Klasifikasi RO	Target	Realisasi	%
Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi	1 Kelompok	1 Kelompok	100

Penilaian terhadap keterpulihan kawasan rawan dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan respondennya Masyarakat (20 orang), Kepala Desa (1 orang) dan Aparat Penegak Hukum (1 orang) di Desa Silawan dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Hasil Pengukuran Indeks Keterpulihan kawasan Rawan**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	1,40 (Bahaya)	1,88 (Waspada)	134,28

Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan status kawasan rawan di Desa Silawan menjadi Waspada dari sebelumnya yaitu Bahaya dengan persentase capaian sebesar **134,28%**.

**b. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Faktor penyebab keberhasilan adalah partisipasi aktif dari anggota kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan terjalinnya sinergitas yang baik antara BNNK Belu dengan Pemerintah Daerah (Dinas Peternakan) dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program.

### **c. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam rangka meningkatkan keterpulihan kawasan rawan makan BNNK Belu terus mendorong anggota kelompok untuk tetap menjalankan usaha dan mempekuat sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan Desa.

Selain penilaian Dektari, Dektara dan Keterpulihan Kawasan Rawan, dilakukan juga penilain Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) dan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Ikotan).

#### **Indeks Kemandirian Partisipatif**

Dalam rangka meningkatkan jumlah instansi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba maka rencana aksi dan strategi yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan sinergitas dan mendorong instansi/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan P4GN di lingkungannya.

Penentuan tingkat kemandirian didasarkan pada beberapa aspek yaitu aspek manusia, metode, anggaran, sistem dan sarana serta prasarana dan aktivitas. Pada Tahun 2025 penilaian dilaksanakan di Instansi Pendidikan dan Kelompok Masyarakat. Secara umum kegiatan P4GN yang dilakukan di Institusi/lembaga berupa pembentukan Satuan Tugas P4GN, diseminasi informasi melalui tatap muka dan media, produksi media promosi (*x-banner*, spanduk, *leaflet*) dan pemeriksaan urine. Pemeriksaan urine terlaksana di PT EI Nusa Petrofin Unit Atapupu dengan sasaran 27 orang.

Dari hasil penilaian yang dilakukan terhadap beberapa instansi/lembaga didapatkan indeks kemandirian partisipatif sebesar 3,55 dengan kriteria Sangat Mandiri.

#### **Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Ikotan)**

Indeks Kota tanggap ancaman narkoba merupakan system pengukuran untuk menilai sejauh mana kesiapan dan ketanggapan suatu wilayah dalam menghadapi ancaman bahaya narkotika dengan varibael ketahan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum.

Responden survei terdiri dari ASN, TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Dunia Usaha/Swasta, keluarga dan masyarakat. Dari hasil survei didapatkan nilai indeks Kota Tanggap Ancaman narkoba sebesar 2,90 dengan Kategori Tanggap dan Nilai Mutu B.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen pemangku kebijakan terkait regulasi/ kebijakan baik lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat.
2. Tumbuhnya kesadaran kelompok masyarakat menjalankan program P4GN.
3. Konsolidasi antar lembaga dan masyarakat.
4. Ketersediaan fasilitas dan akses informasi yang mendukung kegiatan P4GN di masyarakat
5. Pemanfaatan nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam P4GN.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Sasaran IKP.
2. Perencanaan secara matang dan optimal dalam memahami outcome kinerja yang akan dicapai.
3. Pendampingan Penggiat dalam melaksanakan tugas dilingkungannya dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas Penggiat sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian agen perubahan permasalahan narkoba di lingkungannya.
4. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN baik informasi edukasi maupun advokasi dilaksanakan secara berkelanjutan.

Perbandingan antara Target Nasional dengan Realisasi Target IKP yang diperoleh pada tahun 2025 adalah Target Nasional sebesar **1,40** sedangkan realisasi BNNK Belu adalah **1,88 indeks** yang berarti BNNK Belu dapat melampaui target Nasional.

#### **FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA YANG BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MEWUJUDKAN IKOTAN (INDEKS KOTA TANGGA ANCAMAN NARKOBA)**

Definisi Operasional kegiatan ini adalah pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kegiatan kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang disebut KOTAN, merupakan kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota yang berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi ancaman narkoba di 4 (empat) lingkungan sasaran yaitu lingkungan instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Adapun variabel penilaian KOTAN dilakukan dengan variabel ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan dan hukum.

<p><b>SASARAN KEGIATAN 4</b></p> <p><b>“Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika”</b></p>
<p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <p><b>“Presentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup”</b></p>

Sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika adalah salah satu program baru yang dimasukkan sebagai sasaran kegiatan pada tahun 2025 dengan tujuan memberikan pelayanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perhitungan Indeks meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika adalah pengukuran terhadap potret kapabilitas / kemampuan Lembaga dalam memberikan pelayanan rehabilitasi melalui pengukuran kapabilitas rehabilitasi dengan menilai dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, kapasitas, kualitas/standar mutu dan keberlangsungan program.

Persentase penerimaan layanan yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah persentase klien yang mengalami peningkatan kualitas hidupnya setelah mendapatkan layanan rehabilitasi atau intervensi melalui pengukuran dengan menggunakan instrument WHO Quality Of Life (WHOQoL).

Pengukuran dilakukan pada klien yang menerima layanan rehabilitasi berkelanjutan atau intervensi dengan membandingkan nilai akhir dan nilai awal WHOQoL. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas hidup adalah hasil nilai akhir WHOQoL lebih besar dibandingkan dengan nilai awal WHOQoL. Persentase diukur dengan membandingkan jumlah klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah klien yang diukur kualitas hidupnya secara lengkap.

Definisi Persentase Penerima layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan kualitas Hidup adalah Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan / atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrument WHO Quality Of Life (WHOQoL). Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan / atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan / atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi, Pengukurannya menggunakan instrument WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain yaitu : Domain kesehatan fisik, Psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.

### a. Capaian Indikator Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu Tahun 2025 target Persentase Penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan Perhitungan dengan rincian sebagai berikut : BNN Kabupaten Belu target **75,50 %** realisasi **100** atau **132,45%**. Dapat dilihat pada rincian berikut :

**Tabel 15**  
**Hasil Pengukuran Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Persentase Penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75,50%	100	132,45

### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Persentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah dilihat dari Instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL).

**Perhitungan :**

$$\% \text{ Capaian: } \frac{100}{75,50} \times 100\% = 132,45\%$$

### c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

#### Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target Persentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebesar 132,45 % adalah :

- \*) Adanya klien yang ditangani Klinik Pratama BNNK Belu.
- \*) Pelaksanaan Layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya pengakses layanan klinik.
- \*) Klien mengikuti Program Layanan Rehabilitasi sampai selesai.
- \*) Klien mengisi Instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL)
- \*) Penyalahgunaan atau Pecandu yang mengalami peningkatan kualitas hidup.

#### **d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Persentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- \* ) Petugas Rehabilitasi BNNK Belu meningkatkan sosialisasi tentang program Rehabilitasi kepada Penyalahguna atau pecandu yang melaksanakan program rehabilitasi di klinik pratama BNN Kabupaten Belu.
- \* ) Memotivasi klien agar mengikuti layanan Rehabilitasi hingga selesai.
- \* ) Memantau Perkembangan klien dalam mengikuti program layanan Rehabilitasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Diupayakan tetap melaksanakan untuk memberikan peningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai / SDM dalam melakukan penginputan pada aplikasi BOSS.
2. Tetap berkoordinasi secara intensif dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi pecandu / korban penyalahgunaan narkotika.
3. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
4. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Dampak dari kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN adalah terciptanya satu kata bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional tidak hanya melakukan penindakan terhadap penyalahguna narkotika saja, melainkan timbul pemikiran bahwa Badan Narkotika Nasional melindungi dan menyelamatkan masyarakat khususnya pengguna / pemakai narkotika untuk dilakukan rehabilitasi agar pulih dari ketergantungan penggunaan narkotika bahkan sampai memberikan lifeskill agar dapat hidup secara normal di masyarakat.

<b>SASARAN KEGIATAN 5</b> <b>“Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi”</b>
<b>Indikator Kinerja :</b> <b>“Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih”</b>

Definisi operasional **petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih** adalah Masyarakat yang dilatih untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan berbasis masyarakat yang dilakukan langsung oleh masyarakat untuk masyarakat. Sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba diukur dengan jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM.

IBM adalah salah satu program unggulan BNN yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Belu dalam perang melawan narkoba. Dimana BNN mengajak masyarakat untuk bergerak memerangi penyalahgunaan narkoba dilingkungannya secara aktif dan mandiri. Tujuan Program IBM ini adalah membentuk dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan begitu keterbatasan akses terhadap rehabilitasi karena factor geografis, biaya maupun stigma.

**Tabel 16.**  
**Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih**

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$\frac{\sum(b/a)}{100}$	$= 67 / 63 \times 100$ $= 106 \%$	$\sum$ = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih <b>A</b> = Jumlah target petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih <b>B</b> = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

Definisi jumlah Penyelenggara Layanan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih adalah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Sesuai Perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu Tahun 2025 maka target jumlah jumlah Penyelenggara Layanan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih sebanyak 5 (lima) orang.

Berdasarkan kegiatan peningkatan kemampuan petugas penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang telah dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu, sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Agen pemulihan Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan rincian capaian sebagai berikut :

**Tabel 17**  
**Hasil Pengukuran Layanan IBM yang terlatih**

NO	Satker	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Penyelenggara Layanan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih	5 Orang	5 Orang	100

**b. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian jumlah Penyelenggara Layanan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	Unit IBM	Petugas Layanan IBM
1.	Kelurahan Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu	5 Orang
	Jumlah	5 Orang

**Perhitungan :**

$$\% \text{ Capaian: } \frac{5 \text{ Orang}}{5 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$$

Dari data di atas jumlah Penyelenggara Layanan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih adalah sebanyak 5 (lima) orang, dengan capaian target sebesar 100 % yaitu 5 (lima) orang Agen Pemulihan di Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/kegagalan**

**Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan pencapaian target jumlah Penyelenggara Layanan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih sebesar 100 % adalah :

1. Agen Pemulihan/Petugas layanan IBM sudah mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
2. Agen Pemulihan/Petugas Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat aktif dalam kegiatan IBM.
3. Agen Pemulihan/Petugas Layanan IBM sudah melaksanakan kegiatan Pemetaan, Sosialisasi dan penjangkauan.
4. Adanya keinginan Masyarakat untuk menjadi Agen Pemulihan pada daerahnya sendiri
5. Adanya keterbatasan informasi tentang program IBM dan pandangan masyarakat tentang Rehabilitasi

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan jumlah Penyelenggara Layanan Intervensi berbasis Masyarakat (IBM) yang terlatih, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Sarana berupa materi/modul Pelatihan bagi Petugas IBM/Agen Pemulihan pada Layanan IBM.
2. Adanya asistensi secara berkala kepada petugas IBM/Agen Pemulihan tentang layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
3. Adanya Kegiatan Evaluasi Unit IBM di Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu
4. Sosialisasi Program Rehabilitasi bagi Petugas IBM atau Agen Pemulihan agar Petugas IBM dapat Melaksanakan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sesuai standar.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Belu tentang program intervensi Berbasis Masyarakat.
2. Antusias masyarakat terhadap program yang akan di selenggarakan oleh BNN Kabupaten Belu.
3. Adanya keinginan Masyarakat untuk menjadi Agen Pemulihan pada daerahnya sendiri
4. Adanya keterbatasan informasi tentang program IBM dan pandangan masyarakat tentang Rehabilitasi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai institusi penerima wajib lapor.
2. Melakukan Sosialisasi terhadap program Intervensi Berbasis Masyarakat terhadap Desa atau Kecamatan yang belum menerapkan Program IBM
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional IBM yang dilakukan pada kegiatan pendampingan terhadap klien.
4. Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi pecandu / korban penyalahgunaan narkotika.
5. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
6. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
7. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas P4GN.

Dampak yang dirasakan bagi masyarakat terhadap pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di desa/kelurahan setempat adalah keterlibatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat bagi masyarakat untuk peduli terhadap penanganan permasalahan social khususnya bagi pecandu / pemakai pengguna narkotika di desa / kelurahan masing-masing sehingga memudahkan serta menolong masyarakat setempat agar terbebas dari narkotika yang tentunya dibiayai oleh pemerintah desa setempat.

**SASARAN KEGIATAN 6**  
**“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika”**

**Indikator Kinerja :**  
**“Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional”**

Sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika diukur dengan jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional.

Perhitungan Indeks aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika, yaitu BNN Kabupaten Belu melakukan pembinaan, pengawasan kepada lembaga yang melakukan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kepada pecandu / korban penyalahgunaan narkotika yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BNN maupun instansi terkait.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/121/I/DE/RH.03/2023/BNN tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan yang operasional di Kabupaten Belu dan tentunya telah memperoleh dan mendapatkan bimbingan, pembinaan dan pembekalan serta peningkatan standar pelayanan rehabilitasi di wilayah BNN Kabupaten Belu yaitu : Klinik Pratama BNNK Belu.

**Tabel 18.**  
**DATA LEMBAGA REHABILITASI**  
**BNNK BELU YANG OPERASIONAL**

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH KLIEN TAHUN 2025	KLIEN DIATAS 18 <sup>TH</sup>		KLIEN DIBAWAH 18 TH		JUMLAH PETUGAS REHABILITASI	JUMLAH PETUGAS REHABILITASI TERSERTIFIKAT
			L	P	L	P		
1.	KLINIK PRATAMA BNNK BELU	-	-	-	-	-	1	1
<b>JUMLAH</b>		-	-	-	-	-	1	1

Definisi jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional adalah Lembaga Rehabilitasi dan lembaga yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi baik milik instansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan sehingga mampu melakukan pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak kambuh kembali.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Sesuai Perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu Tahun 2025 maka target jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional sebanyak 1 (satu) Lembaga.

Berdasarkan kegiatan peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitasi) lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen masyarakat telah dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu, jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional sebanyak 1(satu) fasilitas dengan rincian capaian sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Hasil Pengukuran Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional**

NO	Satker	Target	Realisasi	%
1	Klinik Pratama BNNK Belu	1	1	100

**b. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Jumlah Lembaga rehabilitasi adalah melalui kegiatan peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitasi) lembaga rehabilitasi yang telah operasional BNN Kabupaten Belu dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	Lembaga	Lembaga	Nama Instansi
1	RSUD	-	-
2	Puskesmas	-	-
3	Klinik Pratama	1 Lembaga	Klinik Pratama BNN Kab. Belu
4	Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1 Lembaga</b>	

**Perhitungan :**

<b>% Capaian:</b>	<b>1 Lembaga</b>	<b>x 100%</b>	<b>= 100%</b>
	<b>1 Lembaga</b>		

Dari data di atas Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional adalah sebanyak 1 (satu) fasilitas, dengan capaian target sebesar 100 % yaitu Klinik Pratama BNNK Belu yang telah melaksanakan proses layanan rehabilitasi rawat jalan medis sejumlah 5 (lima) orang klien secara sukarela.

Terdapat 2 (dua) Lembaga Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang telah bermitra dengan BNNK Belu dengan menjalin Perjanjian kerjasama yaitu UPTD Puskesmas Kota Atambua dan UPDT Puskesmas Haliwen, namun kedua Lembaga tersebut belum melayani klien Rehabilitasi Rawat Jalan.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/kegagalan**

**Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan pencapaian target jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional sebesar 100 % adalah :

- \*) Adanya Kerjasama yang baik antara BNNK Belu dengan stakeholder dan pemegang kebijakan di wilayah Kabupaten Belu dan turut mendukung program rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna.
- \*) Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan Penanganan Pecandu Penyalahguna Narkoba.
- \*) Komitmen yang tinggi dari para stakholder penyelenggara Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat di wilayah Kabupaten Belu.
- \*) Peningkatan kerjasama dan komitmen lembaga maupun masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi.
- \*) Sinkronisasi dan koordinasi dengan lembaga rehabilitasi.
- \*) Penguatan akses pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas rehabilitasi.

**5. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan jumlah instansi/lembaga rehabilitasi yang operasional, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- \*) Pemetaan ulang lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat yang akan diberi peningkatan kemampuan sehingga dapat melaksanakan layanan rehabilitasi.

1. Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung program Rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba.
2. Koordinasi dengan pembina teknis untuk meningkatkan fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang operasional.
3. Sosialisasi Program Rehabilitasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba di wilayah Kabupaten Belu.
- \*4. Penyebarluasan informasi mengenai tempat layanan rehabilitasi serta Program Layanan Rehabilitasi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Belu.
5. Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
6. Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
7. Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas P4GN.

Dampak yang dihasilkan atas jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional sehingga sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba kepada masyarakat adalah tersedianya pusat layanan bagi pecandu/penyalahgunaan narkoba untuk berobat dan berkonsultasi agar terpulih dari ketergantungan narkoba.

Dapat diartikan bahwa memberikan kemudahan dan keuntungan serta mengurangi beban biaya khususnya biaya transportasi dikarenakan lokasi lembaga rehabilitasi bias dijangkau.

Perlu diketahui pula bahwa pelayanan rehabilitasi pecandu / penyalahguna narkoba di lembaga rehabilitasi khususnya Klinik Pratama BNNK Belu tidak dikenakan biaya sama sekali alias GRATIS.

## **SASARAN KEGIATAN 7**

**“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika”**

**Indikator Kinerja :**

**“Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional”**

Rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya disebut sebagai penyalahguna Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum masyarakat menganggap bahwa pelayanan rehabilitasi narkoba dilaksanakan dalam bentuk rawat inap dan rawat jalan. Beberapa penyalahguna narkotika membutuhkan pelayanan rawat inap, khususnya yang mengalami gejala putus zat berat, gangguan kejiwaan, atau mereka yang tidak memiliki dukungan sosial yang memadai. Beberapa lainnya dapat diatasi dengan metode rawat jalan khususnya yang tidak memiliki gejala-gejala yang tersebut di atas. Sementara sebagian besar lainnya tidak memerlukan pelayanan rehabilitasi intensif sebagaimana tersebut di atas melainkan cukup dengan pendekatan sederhana, praktis, singkat, yang dapat dilakukan oleh masyarakat terlatih.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*low threshold*) yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk terlibat didalamnya. Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar sudah merambah sampai ke pelosok daerah. Sementara itu, ketersediaan dan daya tampung lembaga rehabilitasi yang dikelola Pemerintah maupun masyarakat terbatas. Masyarakat dapat berpartisipasi mendukung pemulihan penyalahguna narkotika.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar (Bersih Narkotika). Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meminimalisir masalah penyalahgunaan narkotika, karena memang masalah tersebut ada ditengah masyarakat dan upaya pencegahan dan penanggulangan terdekat juga ada di masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, IBM adalah layanan yang sangat memungkinkan untuk diterapkan diberbagai tatanan masyarakat melalui kegiatan penjangkaun, deteksi dini, edukasi dan pendampingan, serta rujukan sesuai tingkat keparahan dan kebutuhan penyalahguna narkotika.

IBM dikembangkan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narkoba yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan intervensi pada tingkat sekunder dan tersier dalam konteks pencegahan, serta risiko rendah ringan atau yang membutuhkan layanan pasca rehabilitasi dalam konteks rehabilitasi.

Oleh karena IBM dilaksanakan di tingkat masyarakat, maka sasaran dari kegiatan-kegiatan IBM adalah:

- (1) Penyalahguna narkoba,
- (2) Agen Pemulihan (AP),
- (3) Keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan penyalahgunaan narkoba pada salah satu anggota keluarganya,
- (4) Masyarakat yang peduli dan berperan aktif pada rehabilitasi narkoba, serta
- (5) Perangkat desa atau pemerintah lokal sebagai sumber potensi tumbuh kembang IBM.

Definisi Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yaitu jumlah unit Penyelenggara layanan rehabilitasi oleh Agen Pemulihan (AP) pada Desa sasaran IBM yang terbentuk.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Dalam Perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu Tahun 2025 target jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebanyak 1 Unit / Kelompok Masyarakat.

Berdasarkan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat yang terbentuk sebanyak 1 (satu) unit kelompok masyarakat dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel 20**  
**Hasil Pengukuran Unit Layanan IBM yang Operasional**

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Unit Penyelenggara layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional	1	1	100

## b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian jumlah unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah melalui kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat yang telah dilaksanakan BNN Kabupaten Belu dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	Satker	Target	Capaian	Keterangan
1	BNN Kabupaten Belu	1	1	BNN Kabupaten Belu telah membentuk 1 (satu) Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu dengan Nama Moris Diak.

### Perhitungan :

$$\% \text{ Capaian: } \frac{1 \text{ Unit}}{1 \text{ unit}} \times 100\% = 100\%$$

Dari data diatas jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi yang terbentuk sebanyak 1 unit, dengan capaian target sebesar 100%. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.

## c. Faktor Penyebab Keberhasilan

### 1) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian target jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi yang terbentuk sebesar 100 % adalah :

- ✚ Lurah Atambua dan jajaran berperan aktif dalam pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.
- ✚ Adanya kerja sama yang baik antara BNNK Belu dengan stakeholder ikut mendukung program Rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba di Kelurahan Atambua.
- ✚ Tim Agen pemulihan sudah melakukan kegiatan sosialisasi, Pemetaan dan penjangkuan dan layanan IBM ( Skrining).

#### d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan jumlah unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- ✚ Melaksanakan Pemetaan kembali wilayah desa yang akan dibentuk sebagai Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan diberi penguatan agar operasional.
- ✚ Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala terhadap IBM Kelurahan Atambua agar dapat melanjutkan Program Layanan IBM di Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.
- ✚ Melibatkan semua unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Kelurahan Atambua untuk menjadi Agen Pemulihan IBM.
- ✚ Mengikut sertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.
- ✚ Terus melakukan koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi baik Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi pecandu / korban penyalahgunaan narkoba.
- ✚ Membangun sistem dalam memberikan layanan kepada semua lingkungan lembaga, sehingga mudah dalam mendapatkan informasi dan pelayanan rehabilitasi secara gratis dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- ✚ Membangun strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN agar pencapaian target sasaran kegiatan dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
- ✚ Terus melakukan observasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas P4GN.

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan IBM terdiri dari pembentukan IBM dan penyelenggaraan IBM. Pada awal pelaksanaan IBM maka AP melakukan kegiatan sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan, dalam melaksanakan kegiatan ini AP bisa bekerja sama dengan petugas fasilitator dari BNNP/K dan aparat Desa/Kelurahan setempat. Sedangkan berkaitan dengan layanan, IBM dilaksanakan oleh AP dan terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan alur dibawah ini, rangkaian kegiatan IBM dilaksanakan dalam waktu 16 minggu, yaitu satu minggu pertama dilakukan untuk kegiatan skrining, 15 minggu lainnya untuk rangkaian kegiatan dari penerimaan awal sampai tahap bina lanjut.

Pada tahun 2025 ini, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/214/II/DE/RH.03/2025/BNN tanggal 9 Februari 2025 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional Di Lingkungan BNN Provinsi / Kabupaten / Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2025.

<b>SASARAN KEGIATAN 8</b>
<b>“Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika”</b>
<u>Indikator Kinerja :</u>
<b>“Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN”</b>

Definisi Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Belu adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat yang mendapatkan layanan rehabilitasi di klinik pratama BNNK Belu yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan zat (*Substance Use Disorder*). Indeks kepuasan penerima layanan di ukur melalui 9 (Sembilan) indikator yaitu : persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu layanan, biaya dan tarif, produk, spesifikasi dan jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan saran, sarana dan prasarana.

**a. Capaian Indikator Kinerja**

Dalam Perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu Tahun 2025 target Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Belu sebesar **3,8 Indeks**. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Tingkat Penilaian Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi berdasarkan hasil pengukuran kepuasan masyarakat berupa angka. berdasarkan Perhitungan dengan rincian sebagai berikut : BNN Kabupaten Belu target **3,8** realisasi 0 atau 0 % Dapat dilihat pada rincian berikut :

**Tabel 21**

**Hasil Pengukuran Indeks Penerima Layanan Rehabilitasi**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,8	0	0

## b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Belu adalah dilihat dari kuesioner Indeks Kepuasan layanan Rehabilitasi BNN Kabupaten Belu.

**Perhitungan :**

<b>% Capaian:</b>	-	<b>x 100%</b>	<b>= - %</b>
	3,8		

Penilaian Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi tidak ada nilainya, dikarenakan Kriteria Responden Penerima Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan anak yang berusia minimal 12 tahun dan kurang dari 18 Tahun sehingga Klien anak yang di layanani Klinik Pratama BNNK Belu berusia 3 tahun – 9 Tahun tidak mengisi Survei IKM karena tidak memenuhi Kriteria Inklusi.

- a. Pelaksanaan rawat jalan bagi klien di Klinik Pratama BNNK Belu dengan target sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 5 orang klien (Klien Anak usia 3 Tahun – 9 Tahun).
- b. Pelayanan SKHPN PNBP dengan target 80 orang dan terealisasi 57 orang . layanan SKHPN tidak mencapai target karena Biaya Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan SKHPN di lingkungan BNN masih lebih mahal dibandingkan dengan layanan SKHPN di instansi lain (RSUD Mrg. Gabriel Manek, SVD Atambua, Klinik Pratama Polres Belu dan RST Atambua) yang ada di Kabupaten Belu sehingga banyak masyarakat lebih memilih pemeriksaan test urine di instansi lain.

## e. Faktor Penyebab Keberhasilan

### 1. Faktor kegagalan

Faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Belu dari target 3.8 tidak terealisasi - atau - %. Hal ini disebabkan karena :

- ✓ Klien anak yang di rehabilitasi di klinik pratama BNNK Belu tidak dapat mengisi Link Survey Kepuasan Layanan Rehabilitasi karena Kriteria Responden Penerima Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klien Anak Minimal berusia 12 Tahun dan kurang dari 18 Tahun sehingga klien Anak klinik Pratama BNNK Belu (Usia 3 Tahun – 9 Tahun) tidak memenuhi kriteria Inklusi.

**f. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Klinik Pratama BNN Kabupaten Belu, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- \*) Pelaksanaan layanan Rehabilitasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya pengakses layanan klinik.
- \*) Memotivasi klien agar mengikuti layanan Rehabilitasi hingga selesai dan klien mengisi Link Survey Kepuasan layanan rehabilitasi.
- \*) Memantau Perkembangan klien dalam mengikuti program layanan Rehabilitasi.

SASARAN KEGIATAN 9
“Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien”
Indikator Kinerja :
“Nilai Kinerja Anggaran”

Definisi dari Nilai Kinerja Anggaran adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen SAKTI. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Belu Tahun 2025, dimana Target Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah **SANGAT BAIK** dapat terealisasikan sesuai target, dimana pada tahun 2025 ini BNNK Belu mampu mencapai nilai dengan kategori **SANGAT BAIK**, dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 21.**  
**Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Belu**

NO	SEGMENT PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA YANG DINILAI (%)	BOBOT	CAPAIAN (%)
1	NK Perencanaan Anggaran	100	96,03
2	NK Pelaksanaan Anggaran	100	99,49
<b>TOTAL AKUMULATIF NILAI KINERJA ANGGARAN</b>		<b>100</b>	<b>97,76</b>

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	Nilai Kinerja Anggaran	$= \frac{\sum (n2 / n1) \times 100}{100}$	$= \frac{\sum (86,93 / 88) \times 100}{100}$ $= 98,78$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\sum</math> capaian Indikator</li> <li>pengukuran =</li> <li>Jumlah hasil capaian</li> <li>- n1 = Realisasi Anggaran</li> <li>- n2 = Target Nilai Kinerja Anggaran BNN</li> </ul>

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 BNNK Belu sesuai Hasil Aplikasi SMART Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 22.

**DATA NILAI KINERJA ANGGARAN BNNK BELU TAHUN 2025**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif efisiensi.	Nilai Kinerja Anggaran	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	97,76%

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :**

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2023 diberikan target dengan indeks **95** yang ditetapkan untuk Nilai Kinerja Anggaran dapat terealisasi **83,13** atau dengan capaian sebesar **87,50 %** dan tahun 2024 dengan target 87 indeks dapat terealisasi 99,95 atau 114,88% yang artinya ada peningkatan kenaikan nilai, 0,37, Sedangkan pada tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran ditargetkan SANGAT BAIK dan dapat dicapai pula dengan hasil SANGAT BAIK dengan capaian nilai **97,76** indeks.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun dan tentunya hal ini menjadi tantangan yang lebih berat lagi untuk dapat mempertahankan.

**Tabel 23**  
**DATA NILAI KINERJA ANGGARAN BNNK BELU**  
**TAHUN 2021 – 2025**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2021</b>	<b>90</b>	<b>96,88</b>	<b>107,64%</b>
<b>2</b>	<b>2022</b>	<b>95</b>	<b>99,24</b>	<b>104,46%</b>
<b>3</b>	<b>2023</b>	<b>95</b>	<b>83.13</b>	<b>87.50 %</b>
<b>4.</b>	<b>2024</b>	<b>87</b>	<b>99.95</b>	<b>114,88 %</b>
<b>5.</b>	<b>2025</b>	<b>SANGAT BAIK</b>	<b>SANGAT BAIK</b>	<b>97,76</b>

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.
3. Pendaftaran belanja kontraktual setelah 5 hari ditandatangani kontrak sehingga menyebabkan indikator penilaian Kinerja anggaran menjadi berkurang.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.

3. Capaian output telah sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
3. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan secara berkala.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan ASN yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.
4. Agar dalam pengelolaan anggaran selalu memperhatikan indikator Nilai Kinerja Anggaran.
5. Pelaksanaan kegiatan selalu berpedoman pada Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah diinput pada Aplikasi SAKTI.

Dampak yang timbul dari pencapaian Nilai Kinerja Anggaran mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran dan kinerja telah serasi dan sesuai dengan perencanaan yang disusun bersama, dan tentunya memberikan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap personil BNN Kabupaten Belu dalam menjalankan program-program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerjanya.

**SASARAN KEGIATAN 10**  
**“Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur”**

**Indikator Kinerja :**  
**“Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)”**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sama seperti di tahun sebelumnya Indikator IKPA ini berjumlah 7 (tujuh) indikator dana masing-masing memiliki bobotnya sendiri. Untuk itu pada sosialisasi ini juga dijelaskan terkait beberapa penyesuaian bobot terkait indikator kinerja pada IKPA tahun 2025.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 3 (tiga) aspek/sisi pengukuran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yaitu :

1. **Kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari :**
  - a. Revisi DIPA (100 %)
  - b. Deviasi Halaman III DIPA (100%)
2. **Kualitas Pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
  - a. Penyerapan Anggaran (100 %)
  - b. Belanja Kontraktual (100 %)
  - c. Penyelesaian Tagihan (100%)
  - d. Pengelolaan UP/TUP (98,87%)
3. **Kualitas Hasil pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap pencapaian output terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu : **Capaian Output (98,42 %)**

**Kategori Nilai IKPA :**

1. SANGAT BAIK : nilai IKPA = 95
2. BAIK : 89 = nilai IKPA < 95
3. CUKUP : 70 = nilai IKPA < 89
4. KURANG : nilai IKPA < 70

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Belu Tahun 2025, dimana Target IKPA Tahun 2025 adalah 100 Indeks dan dapat terealisasi dengan **nilai 99,49 Indeks**, maka dapat dikategorikan **SANGAT BAIK** sebagaimana pengukuran pada tabel berikut ini :

**Tabel 24**  
**DATA INDEKS NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**  
**BNNK BELU TAHUN 2025**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	99,49	99,49%

**Tabel 25.**  
**Formulasi perhitungan indikator kinerja kegiatan**  
**Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Belu**

NO	INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	NILAI AKHIR
1	Revisi DIPA	10	100	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	10	100	10,00
3	Penyerapan Anggaran	20	100	20,00
4	Belanja Kontraktual	10	100	10,00
5	Penyelesaian Tagihan	10	100	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	100	9.89
7	Capaian Output	25	100	24.60
	<b>TOTAL NILAI IKPA &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99.49</b>

### Metode pengukuran nilai IKPA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	HASIL PERHITUNGAN	KETERANGAN
1.	<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b>	$= \frac{\sum (n2 / n1) \times 100}{100}$	$= \frac{\sum (98,94 / 95) \times 100}{100}$ $= 104,14$	- $\sum$ capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian - n1 = Realisasi Anggaran - n2 = Target Nilai Kinerja Anggaran BNN

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2025 diberikan target dengan indeks 100 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Belu, **terrealisasi 99,49 indeks** atau **99,49 %** dengan Kategori **Sangat Baik**.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Belu.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Adanya evaluasi kinerja kegiatan yang melalui rapat Analisis dan Evaluasi bulanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
2. Capaian output belum sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.
3. Target Indikator Kegiatan yang ditetapkan terlalu tinggi tidak sesuai realita di lapangan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.
3. Perlu ada Waskat dari Pimpinan/atasan langsung dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.
4. Melakukan pengawasan terhadap progres capaian anggaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2025 yang telah dijanjikan oleh BNN Kabupaten Belu dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, kesemuanya mencapai target dari tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 26.**  
**DATA INDEKS NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)**  
**BNNK BELU TAHUN 2020 - 2025**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KET
1.	2020	94	91,07	96,88
2.	2021	94	97,77	102,91
3.	2022	95	97	102,10
4.	2023	92	90.50	98.36
5.	2024	87	99.90	105,54
6.	2025	100	99,49	99,49%

Dampak terhadap Nilai IKPA ini tentunya adalah memberikan kepercayaan dan motivasi bagi seluruh anggota BNN Kabupaten Belu untuk tetap bekerja keras dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga rasa memiliki tugas dan tanggungjawab yang diembannya semakin meningkat.

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada Tahun Anggaran 2025, BNNK Belu mendapat alokasi pagu anggaran awal sebesar **Rp. 1.764.011.000,-** kemudian Pemerintah memberlakukan Efisiensi Anggaran secara nasional dan BNNK Belu mendapat pagu efisiensi sebesar **Rp. 163.437.000,-** sehingga sisa pagu menjadi **Rp. 1.600.574.000,-** Kemudian pada **Triwulan II** diberlakukan lagi Penghematan anggaran untuk BNNK Belu mendapat pagu sebesar **Rp.48.642.000,-** sampai dengan Triwulan III sehingga sisa Pagu menjadi **Rp. 1.551.932.000,-** Kemudian untuk menghindari pagu Minus BNN, diberlakukan lagi penghematan sebesar **Rp. 10.172.000,-** sehingga sisa pagu sampai dengan akhir tahun anggaran menjadi **Rp.1.541.760.000,-**. Dari jumlah pagu tersebut, pada Tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. **1,359,996,505,-** atau **88,21 %** dan **sisa anggaran ditambah efisiensi sebesar Rp. 181.763.495,-** atau **11,79 %**.

Sedangkan Pagu PNBPN untuk Tahun 2025 dialokasikan sebesar **Rp. 18.120.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 13.014.000,-** atau **71.82 %** dan sisa yang tidak realisasi sebesar **Rp. 5.106.000,-** atau **28.18 %** dengan target Layanan SKHPN sebanyak **80 SKHPN** dan terealisasi sebanyak **57 SKHPN** atau **71.25 %** dan sisa yang tidak tercapai sebanyak **23 SKHPN** atau **28.75 %**. Hal utama yang melatarbelakangi tidak tercapainya layanan SKHPN adalah karena tarif SKHPN di BNN lebih tinggi daripada Fasilitas Kesehatan yang lain sehingga lebih mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di sana daripada di BNN.

**Tabel 27.**

**DATA PAGU DAN REALISASI BNNK BELU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	TAHUN	MURNI	PNBP	HIBAH	TOTAL	REALISASI	%
1.	2025	1.541.760.000	18.120.000	0	1.523.640.000	1,359,996,505,-	88,21

Rincian penggunaan anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) antara lain :

**A. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)** dengan rincian sbb :

**Tabel 28  
Realisasi Kegiatan dan Anggaran**

1. Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M)

No	Kode	Kegiatan	Anggaran			Output			Ket
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	3247 QDE	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	35.000.000	27.950.000,-	79.85	20	20 Klrgr	100	Terealisasi
2.	3247 UBB	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	40.000.000	28.205.000	70.51	1	1 Desa	100	Terealisasi

3.	3248	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkotika	80.000.000	69.725.000	87,15	1	1 Kel.Masy.	100	Terealisasi
4.	5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	57.000.000	47.100.000	82,63	10	10 Orang	100	-
<b>TOTAL &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</b>			<b>177.000.000</b>	<b>172.980.000</b>	<b>97.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2. Sub Koordinator Rehabilitasi

No	Kode	Kegiatan	Anggaran			Output			Ket
			Pagu	Realisasi	%	Tar get	Realis asi	%	
1	3256	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	11.720.000	4.440.000	37.88	15 Orang	5 Orang	33,3	
2.	3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	14.037.000	11.887.000	84.68	5 Orang	5 Org	100	
3.	3260 BAA 002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	22.950.000	17.450.000	76,03	5 Orang	5 Org	100	
4.	3260 BAA 003	Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)	18.120.000	13.014.000	71,82	80	57 Org	71,25	
5.	3260 BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.400.000	1.200.000	50	2 Lmbga	2 Lmbga	100	
6.	3260 QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	13.170.000	8.350.000	63,40	1 Kel.Mas	1 Kel. Masy.	100	

<b>TOTAL &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</b>	<b>82.397.000</b>	<b>56.341.000</b>	<b>68.37</b>				
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--

## B. Program Dukungan Manajemen

### Sub Bagian Umum

No	Kode	Kegiatan	Anggaran			Output			Ket
			Pagu	Realisasi	%	Targ et	Realisasi	%	
1	3236 EBA. 994	Layanan Perkantoran	77.100.000	69.450.000	90,07	12	12 Layanan	100	
2.	3236 EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	5.242.000	2.580.000	49,1	2	2 Dok.	100	
3.	3237 EBC 954	Layanan Manajemen SDM	8.610.000	8.601.500	100	1	1 Layanan	100	
4.	3238 EBD 952	Layanan Perencanaa n dan Panggar an	31.904.000	19.540.530	61,24	2	2 Dokumen	100	
5.	3238 EBD 953	Layanan Pemantaua n dan Evaluasi	6.822.000	3.088.000	45,26	2	2 Dokumen	100	
6.	3239 EBA 962	Layanan Umum	122.098.000	61.033.700	49,9	1	1 Layanan	100	
7.	3239 EBA 994	Layanan Perkantoran	990.587.000	963,708,275	97,28	12	12 Layanan	100	
8.	3979 EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat	5.000.000	3.825.500	76,51	1	1 Layanan	100	
		JUMLAH <<<	1.238.753.000	1.131.827.505	91,36				

Perbandingan secara umum pagu dan realisasi penyerapan anggaran pada BNN Kabupaten Belu sejak Tahun 2021 - 2025 dapat digambarkan dalam tabel di bawah :

**Tabel 29.**

**DATA PAGU DAN REALISASI BNNK BELU  
TAHUN ANGGARAN 2021 – 2025**

NO	TAHUN	MURNI	PNBP	HIBAH	TOTAL	REALISASI	%
1.	2021	1.640.130.000	17.400.000	0	1.657.530.000	1.628.523.760	98,25
2.	2022	1.683.195.000	16.240.000	0	1.886.524.000	1.674.297.257	98,52
3..	2023	1.870.284.000	16.240.000	0	1.886.524.000	1.874.843.061	99,38
4..	2024	1.625.840.000	33.640.000	0	1.659.480.000	1.653.887.791	99,66
5..	2025	1.523.640.000	18.120.000	0	1.541.760.000	1.359.996.505	88,21%

Pada Tahun Anggaran 2025, pagu murni yang diterima oleh BNN Kabupaten Belu sebesar Rp. 1.764.011.000,- Dalam perjalanan pagu anggaran mengalami pengurangan karena efisien anggaran sebesar Rp. 222.251.000,- sehingga sisa anggaran sampai akhir tahun menjadi Rp. 1.541.760.000,- dan terealisasi Rp. 1.359. 996.505,- sedangkan sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 18.326.495,- Untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 30**

**Rincian Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	OUT PUT	KEGIATAN	KEUANGAN			
			PAGU	REALISASI	%	SISA
1.	BL. 3247. QDE. 002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	35 .000.000	27.950.000	79.85 %	Sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp.7.050.000,- merupakan anggaran blokir.

2.	BL. 3247. UBB. 001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa	40.000.000	28.205.000	70.512%	Sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp.11.795.000,- merupakan anggaran blokir.
4.	BL. 3256	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	11.720.000	4.440.000	37.88%	Sisa yang tidak terealisasi terdiri dari anggaran blokir sebesar Rp.2.550.000 dan sisa yg tidak digunakan sebesar Rp.4.730.000.
5	BL. 3259.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	14.037.000	11.887.000	84.68%	Sisa yang tidak terealisasi terdiri dari anggaran blokir sebesar Rp.1.530.000 dan sisa yg tidak digunakan sebesar Rp.620.000
6	BL. 3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	56.640.000	40.014.000	70.64	Sisa yang tidak terealisasi terdiri dari anggaran blokir sebesar Rp.1.530.000 dan sisa yg tidak digunakan sebesar Rp.620.000
9	BL. 3260. BAA. 003	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	18.120.000	13.014.000	71.82%	Sisa yang yang tdaik realisasi sebesar Rp.5.106.000,-
10	BL. 3260. BDB. 001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1.200.000	1.200.000	100,00 %	0
11	BL. 3260. QDB.	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	13.120.000	8.350.000	70.64%	Sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.300.000 merupakan pagu blokir dan Rp. 3.470.000 menjadi sisa yang tidak terealisasi.

12	BL. 5936. SCJ. 001	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksanaan P4GN Bidang pencegahan	57.000.000	47.100.000	82,63%	Sisa yang tidak realisasi sebesar Rp. 9.900.000 merupakan pagu blokir.
13	WA. 3236. EBA. 994	Layanan Perkantoran	77.100.000	69.450.000	90.07%	Sisa yang tidak realisasi sebesar Rp. 7.650.000 merupakan pagu blokir.
14	WA. 3236. EBA. 995	Layanan Manajemen Keuangan	5.242.000	2.580.000	49.21 %	Sisa yang tidak realisasi sebesar Rp. 2.662.000 merupakan pagu blokir.
15.	WA. 3237. EBC. 954	Layanan Manajemen SDM	8.610.000	8.601.500	99.90%	Merupakan sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 8.500,-
16.	WA. 3238. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penggangan	31.904.000	19.540.530	61.24 %	Sisa yang tidak realisasi sebesar Rp. 12.363.470,- merupakan pagu blokir.
17.	WA. 3238. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.822.000	3.088.000	100,00 %	Sisa yang tidak realisasi sebesar Rp. 3.734.000,- merupakan pagu blokir.
18.	WA. 3239. EBA. 962	Layanan Umum	122.098.000	61.033.700	49.98%	Sisa yang tidak realisasi sebesar Rp. 61.064.300,- merupakan pagu blokir.
19.	WA. 3239. EBA. 994	Layanan Perkantoran	990.587.000	963.708.275	99,68%	Sisa yang tidak realisasi sebesar Rp. 3.082.725,- merupakan sisa anggaran yang tidak digunakan. Sedangkan sisa pagu blokir sebesar Rp.23.796.000,-
20.	WA. 3979.	Layanan Hubungan	5.000.000	3.825.500	98.22%	Sisa yang tidak realisasi sebesar Rp.

	EBA. 958	Masyarakat dan Informasi				1.174.500,- merupakan pagu blokir.
TOTAL ANGGARAN			1.541.760.000	1.359.996.50 5	88.21%	
TOTAL ANGGARAN BLOKIR			163.437.000			
TOTAL ANGGARAN YANG DIKELOLA			1.378.323.000	1.359.996.5 05	88.21%	18.326.495,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan BNN Kabupaten Belu sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Belu telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) BNN Kabupaten Belu Tahun 2025 serta Rencana Program Kerja (RENPROJA) 2025 - 2029.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan LKIP mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu pencapaian kinerja BNN Kabupaten Belu Tahun 2025, telah melakukan berbagai upaya dengan optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN. Dukungan moril dan materil dari semua pihak sangat dibutuhkan oleh BNN Kabupaten Belu dalam mewujudkan Kabupaten Belu Bersinar (Bebas Dari Narkoba) pada khususnya dan Wilayah Indonesia pada umumnya, sehingga Target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2025 bisa terwujud.

Bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran yang sudah direncanakan, guna memperoleh dampak pencapaian kinerja secara nyata dan terukur, tercapai, realistis dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi dasar serta tuntutan bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan amanat serta tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu.

Program P4GN yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2025 ini telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan walaupun masih ada beberapa kekurangan pemenuhan target yaitu Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN dan Presentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup belum terpenuhi, namun semoga kekurangan yang belum tercapai dimaksud semakin menambah motivasi untuk bekerja secara maksimal pada tahun anggaran yang akan datang.

Adapun kesimpulan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BNN Kabupaten Belu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Semangat kebersamaan dan pantang menyerah untuk selalu memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Belu merupakan sikap professional yang ditumbuhkembangkan oleh seluruh personil BNN Kabupaten Belu dalam melaksanakan tugas P4GN.
2. Menjalin kebersamaan dan kerjasama antara BNN Kabupaten Belu dan berbagai stakeholder baik instansi pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Belu dalam pelaksanaan program P4GN, salah satunya adalah timbulnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba di lingkungannya masing-masing diantaranya terciptanya Instansi Pemerintah Kabupaten Belu Bersih Narkoba, Desa Bersih Narkoba, Sekolah Bersih Narkoba dan Kampus Bersih Narkoba di wilayah Kabupaten Belu.
3. Peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sangat efektif sebagai sarana penyebaran informasi P4GN di wilayah Kabupaten Belu.
4. Peran serta masyarakat dan pemerintah secara berkelanjutan sehingga melahirkan Satgas-satgas dan penggiat anti narkoba yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan pemerintah, swasta, pekerja, masyarakat dan keluarga
5. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi, harus mempersiapkan regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat berjalan lancar.
6. Walaupun pelaksanaan pengungkapan jaringan pengedar narkoba tidak dianggarkan, namun BNNK Belu tetap melakukan pengawasan dan pemantauan di daerah perbatasan RI-RDTL di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain guna mengetahui pergerakan atau perlintasan orang dan barang di wilayah perbatasan.
7. Perlu adanya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Tupoksi Seksi/sub Bagian Umum sehingga penetapan target kinerja dapat tercapai sesuai ketentuan.

## B. SARAN

Untuk meningkatkan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu dalam pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan tugas fungsi pokok masing-masing sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tugas.
2. Meningkatkan pengawasan dan monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik secara internal Satker maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan dan bukan evaluasi saja.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba.
5. Penetapan Target Rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.
6. Dengan pelaksanaan program Rehabilitasi yang jangka panjang dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
7. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan perlintasan orang dan barang di daerah Perbatasan RI-RDTL.
8. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan.

Atambua, 12 Januari 2026  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Belu,  
  
**Mateus Cono, SH, M.H**  
**AKBR NRP. 68030551**

# ***LAMPIRAN - LAMPIRAN***



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELU  
TAHUN 2025**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : MATEUS CONO, SH, M.H.**  
**Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN BELU**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : TOTOK LISDIARTO S.S.I.K.,S.H.,M.H.**  
**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

  
**TOTOK LISDIARTO S.S.I.K.,S.H.,M.H.**

Jakarta, 30 Januari 2025  
Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KABUPATEN  
BELU**

  
**MATEUS CONO, SH, M.H.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELU**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,51 Indeks
2	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	1,40 Indeks
3	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	76,700 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	75,50 Indeks
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,8 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	Sangat Baik -
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.57.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.80.000.000
3. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.75.000.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.11.720.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.037.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.56.640.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.82.424.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.10.660.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.38.990.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.120.461.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.5.000.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI  
 NUSA TENGGARA TIMUR**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KABUPATEN  
 BELU**

  
**TOTOK LISDIARTO S.S.I.K.,S.H.,M.H.**

  
**MATEUS CONO, SH, M.H.**



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	172	066	419265	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.87	98.42	99.49	100%	0.00	99.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.89	24.60				
					Nilai Aspek	100.00		99.72				98.42				

[Download Excel](#)

Tampilkan  entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	066.01.419265	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu	96,03	99,49	97,76

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)